

ANALISIS REALISASI KINERJA KEUANGAN DISPENDA KABUPATEN BADUNG BERDASARKAN VALUE FOR MONEY TERHADAP PHR TAHUN 2008-2012

Ni Made Vitri Udhiyani¹, Made Ary Meitriana¹, Anjuman Zukhri²

Jurusan Pendidikan Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail: {vitri_udhiyani@yahoo.com¹, ary.meitriana@yahoo.co.id¹,
anjumanzukhri09@gmail.com²}@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang objektif tentang kinerja keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung terhadap pajak Hotel dan Restoran yang ditinjau melalui pengukuran *value for money* yakni (1) sudut ekonomi, (2) sudut efisiensi, dan (3) sudut efektivitas tahun 2008-2012. Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Data dianalisis dengan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) dari sudut ekonomis pada tahun 2008 105,65%, tahun 2009 sebesar 108,65%, tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar 106,32% dan 103,48%, sedangkan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 104,55%, (2) dari sudut efisiensi diperoleh hasil pada tahun 2008 sebesar 2,52%, tahun 2009 yaitu sebesar 2,57%, 2010 dan 2011 masing-masing memiliki sebesar 2,39% dan 2,04%, sedangkan tahun 2012 yaitu 1,78% (3) dari sudut efektivitas pada tahun 2008 mencapai 115,59%, pada tahun 2009 dan 2010 menurun menjadi sebesar 103,83% dan 103,37%, dan tahun 2011 dan 2012 mengalami peningkatan menjadi 112,17% dan 113,8%.

Kata kunci: kinerja keuangan, pajak hotel dan restaurant, *value for money*

Abstract

This research is held in order to get the real information about Value For Money of Local Revenue Offices in Badung regency for Hotel and Restaurant taxes. Which is observed through by some points of view, such as: (1) Economic, (2) Efficiency (3) Effectivity for the period of 2008 – 2012. I have the datas through by documentary and interviewing. All the datas are analised through by descriptive and quantitative. From this analysis, I could make the conclusion that the analysis of hotel and restaurant taxes of Dispenda Badung Regency could be seen from many aspects: (1) economic in 2008 is 105, 65 %, in 2009 is 108,65 % in 2010 and 2011 it had decrising up to 106,32% and 103,48%, while in 2012 it had growth is 104,55 % (2) Ratio aspect: it could have ratio efficiency in 2008 is 2,52 %, in 2009 is 2,57 %, in 2010 is 2,39 % in 2011 is 2,04 % while in 2012 is 1,78 % (3) Effectivity aspect: in 2008 it can reach up to 115,59 %, in 2009 is 103,83 %, in 2010 is 103, 37 % in 2011 and 2012, it had increasing up to 112,17 % and 113,8 %.

Keywords: performance financial, Hotel and Restaurant taxes, value for money

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik Negara atau

daerah, dan berbagai organisasi publik kepada lembaga-lembaga sektor publik adalah adanya tuntutan lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik yang bersangkutan. Werimon, dkk (2007:3) menyatakan bahwa

transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Dari informasi tersebut dapat dinilai kinerja lembaga-lembaga sektor publik yang bersangkutan sehingga terlihat jelas sejauh mana sistem manajemen kerja menunjukkan hasil kinerja yang optimal.

Padovani, dkk (2009:6) mengatakan, sistem manajemen kinerja semakin diimplementasikan dalam organisasi sektor publik. Penilaian kinerja pemerintah daerah terhadap suatu kabupaten merupakan tuntutan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan menyampaikan laporan keuangan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya.

Dalam organisasi pemerintahan, pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk membantu memperbaiki kinerja instansi, memperbaiki pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik oleh organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki masyarakat yang mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya,

efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya, serta efektif (berhasil guna) dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kabupaten Badung merupakan salah satu bagian dari Provinsi Bali. Dalam menjalankan roda pemerintahannya Kabupaten Badung juga memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung yang bersumber dari penerimaan daerah Kabupaten badung. Sumber penerimaan daerah tersebut sebagian besar bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam tidak bisa diandalkan lagi. Sumber penerimaan dari pajak berlangsung secara terus menerus dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Ratug, 2009:8). Besarnya penerimaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun dapat dilihat dari jumlah komponen pendapatan daerah yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Selama ini kinerja Dispenda Kabupaten Badung dinilai berdasarkan tingkat pencapaian maksimal dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian target penerimaan dari sektor pajak ini sangat dipengaruhi oleh kinerja Dispenda Kabupaten Badung, sehingga selisih antara target penerimaan dan realisasi tidak terjadi perbedaan signifikan dari pencapaian target penerimaan pajak yang diterima.

Pajak hotel dan restoran merupakan salah satu potensi yang memberikan kontribusi tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Berikut ini ringkasan target dan realisasi pajak hotel dan restoran pada Dispenda Kabupaten Badung tahun 2008-2012 disajikan pada tabel 1 dan tabel 2 berikut.

Tabel 1. Ringkasan Target dan Realisasi Pajak Hotel di Kabupaten Badung

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Ketercapaian Persentase (%)
2008	506.900.000.000	579.748.984.665,13	114,37
2009	575.500.000.000	592.761.049.412,29	103,00
2010	693.000.000.000	713.206.180.445,45	102,92
2011	763.675.500.000	853.142.442.162,45	111,72
2012	852.900.000.000	947.755154.539,10	107,70

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat dari tahun ke tahun selalu melebihi target bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel yang telah ditetapkan.

Tabel 2. Ringkasan target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada Dispenda Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2008-2012

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Ketercapaian Persentase (%)
2008	43.000.000.000	55.934.645.897,19	130,08
2009	56.675.000.000	63.642.551.096,25	112,29
2010	79.750.000.000	85.621.105.444,41	107,36
2011	100.500.000.000	116.206.318.953,70	115,63
2012	110.000.000.000	149.815.743.691,64	120,20

Berdasarkan penelitian awal tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Badung dari tahun ke tahun selalu melebihi target yang telah ditetapkan tetapi mengalami suatu fluktuasi, yakni kadang mengalami kenaikan kadang mengalami penurunan di tiap tahunnya. Berdasarkan uraian penjelasan tentang penerimaan atas pajak hotel dan restoran yang berfluktuasi sebagai salah satu penerimaan pendapatan asli daerah, maka perlu kiranya dilakukan suatu penilaian atau pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur berdasarkan tingkat rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas agar Pemerintah Daerah Kabupaten Badung serta masyarakat umum dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan yang telah dapat dicapai Dispenda dalam mengelola keuangan daerahnya. Hal ini juga menjadi jalan yang baik untuk menciptakan Kabupaten Badung sebagai daerah yang tertib dan transparansif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good*

governance) dimata publik serta dapat menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dimiliki masing-masing daerah itu sendiri sesuai UU RI No. 32 Tahun 2004 dan UU RI No.33 Tahun 2004.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan / program / kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi (Indra Bastian, 2001 : 329). Dijelaskan juga oleh Mulyadi (2007) kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu organisasi dalam mewujudkan perencanaan strategis yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga kinerja dapat dijadikan pedoman untuk mengkaji program-program yang sudah berjalan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi baru yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Abdul Halim (2000) upaya meningkatkan kemampuan penerimaan

daerah, khususnya penerimaan dari PAD harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus berlanjut agar pendapatan asli daerah terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Sasaran pengukuran *value for money* adalah pengukuran kegiatan atau program secara finansial, program secara finansial akan tercermin dari laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2002: 130), "Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen sektor publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik".

Value for money dapat tercapai apabila suatu organisasi telah menggunakan biaya paling kecil untuk

mencapai keluaran yang maksimal dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran. Suatu program dapat dikatakan ekonomis bila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu, untuk suatu program dikatakan efisien apabila program dicapai dengan penggunaan sumber daya khususnya dana yang serendah-rendahnya, dan suatu program dapat dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sehingga diharapkan suatu pelaksanaan program maupun kegiatan harus berjalan beriringan baik berjalan secara ekonomis, efisien, maupun efektif. Jelaslah bahwa ketiga pokok bahasan dan *value for money* sangat terkait satu sama lainnya. Ekonomi membahas mengenai masukan (*input*), efisiensi membahas tentang masukan (*input*) dan keluaran (*output*), dan efektivitas membahas mengenai keluaran (*outcome*).

METODE

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menyalin data atau dokumen tertentu dan catatan secara sistematis mengenai laporan PAD, penerimaan dan realisasi pajak hotel dan restoran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung periode 2008-2012. Metode wawancara ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berwenang memberikan ijin penelitian dan mengeluarkan data. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala Dispenda Kabupaten Badung, selanjutnya pertanyaan langsung dan mengkhusus ditujukan pada bagian keuangan untuk memperoleh informasi terkait dokumen maupun kinerja keuangan tahun 2008-2012.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Fokus penelitian ini adalah mengukur kinerja keuangan dengan *value for money* pada penerimaan pajak hotel dan restoran di Dispenda Kabupaten Badung.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik analisis kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk melakukan perhitungan *value for money* dengan menggunakan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Adapun rasio-rasio yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a) Rasio Ekonomi

Rasio ini menunjukkan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah (Mardiasmo, 2002:4).

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Anggaran Biaya Pajak Hotel Restoran}}{\text{Realisasi Biaya Pajak Hotel Restoran}} \times 100\% \quad (1)$$

Tabel 3 Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Ekonomis
91% - 100%	Ekonomis
81% - 90%	Cukup Ekonomis
61% - 80%	Kurang Ekonomis
< 60%	Tidak Ekonomis

- b) Rasio Efisiensi merupakan perbandingan *output* dan *input*. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan yang diterima (Abdul Halim, 2002:129).

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Pajak Hotel Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Restoran}} \times 100\% \quad (2)$$

Tabel 4. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Tidak Efisien
91% - 100%	Kurang Efisien
81% - 90%	Cukup Efisien
61% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

- c) Rasio Efektivitas
Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari informasi dalam mencapai suatu tujuan. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim, 2002:129).

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pajak Hotel Restoran}}{\text{Target penerimaan Pajak Hotel Restoran}} \times 100\% \quad (3)$$

Tabel 5. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
91% - 100%	Efektif
81% - 90%	Cukup Efektif
61% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Realisasi program pada Dispenda Kabupaten Badung dari sudut ekonomis dilakukan dengan membandingkan antara anggaran biaya dengan realisasi biaya. Tingkat ekonomis kinerja Dispenda Kabupaten Badung dapat diketahui dengan melakukan perhitungan rasio ekonomis,

kemudian dirumuskan ke dalam kriteria kinerja keuangan, sehingga dapat diketahui kinerja dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Uraian anggaran biaya dan realisasi biaya serta rasio ekonomis Dispenda Kabupaten Badung tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Anggaran Biaya dan Realisasi Biaya serta Rasio Ekonomis Dispenda Kabupaten Badung tahun 2008-2012

Tahun (1)	Anggaran Biaya (Rp) (2)	Realisasi Biaya (Rp) (3)	Rasio Ekonomis (%) (4) = (2) : (3) x 100%
2008	16.974.080.345	16.066.159.675	105,65%
2009	18.338.080.000	16.878.486.576	108,65%
2010	20.286.520.650	19.080.843.100	106,32%
2011	20.490.645.340	19.800.675.200	103,48%
2012	20.650.450.220	19.750.780.100	104,55%

Berdasarkan data yang tertera pada Tabel 6 tersebut menunjukkan terjadinya perkembangan tingkat ekonomis tiap tahunnya, tetapi mengalami fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2008 rasio ekonomis sebesar 105,65% dan tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi sebesar 108,65%, sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 106,32 dan 103,48, dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 104,55%. Hal ini disebabkan karena tidak cermat dalam mengalokasikan biaya yang dapat berdampak pada pemborosan.

Dari anggaran yang dirancang oleh Dispenda Kabupaten Badung akan diformulasikan ke dalam rekapitulasi program yang telah dijalankan, hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja Dispenda Kabupaten Badung dalam merealisasikan programnya. Rasio ekonomis yang digunakan ke dalam kriteria kinerja keuangan adalah rasio ekonomis yang bersumber dari aktivitas keuangan yang telah dijalankan setiap tahunnya.

Adapun kriteria kinerja keuangan yang digunakan bersumber dari Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang kriteria ekonomi kinerja keuangan.

Kriteria tersebut diantaranya rasio lebih dari 100% tergolong sangat ekonomis, hal ini menunjukkan pengalokasian anggaran sudah tepat bahkan bisa menekan anggaran dan menjadi harapan jika pengalokasian bisa mencapai lebih 100%. Selanjutnya rasio 91%-100% tergolong ekonomis yang menunjukkan pengalokasian yang seimbang, rasio 81%-90 % tergolong cukup ekonomis, rasio 61%-80% tergolong kurang ekonomis dan rasio kurang dari 60% tergolong tidak ekonomis.

Berdasarkan Tabel 6 terkait anggaran biaya dan realisasi biaya serta rasio ekonomis Dispenda Kabupaten Badung pada tahun 2008-2012 akan ditentukan kriteria kinerja keuangan Dispenda Kabupaten Badung dalam menjalankan programnya pada tahun 2008-2012 seperti terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kriteria Kinerja Dispenda Kabupaten Badung ditinjau dari segi ekonomis tahun 2008-2012

Tahun	Rasio Ekonomis	Kriteria Ekonomis
2008	105,65%	Sangat Ekonomis
2009	108,65%	Sangat Ekonomis
2010	106,32%	Sangat Ekonomis
2011	103,48%	Sangat Ekonomis
2012	104,55%	Sangat Ekonomis

Realisasi program pada Dispenda Kabupaten Badung dari sudut efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi biaya dengan realisasi

penerimaan. Tingkat efisiensi dapat diketahui dengan melakukan perhitungan rasio efisiensi, kemudian dirumuskan ke dalam kriteria kinerja keuangan,

selanjutnya dapat diketahui kinerja Dispenda Kabupaten Badung telah mampu melakukan kegiatan operasional organisasi dengan penggunaan sumber daya dan

dana yang serendah-rendahnya. Dana yang diaggarkan tidak semata-mata untuk dihabiskan namun disesuaikan dengan kebutuhan agar tidak terjadi pemborosan.

Tabel 8. Anggaran Biaya dan Realisasi Biaya serta Rasio Efisiensi Dispenda Kabupaten Badung tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Biaya (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) : (3) x 100%
2008	16.066.159.675	635.683.630.562,32	2,52%
2009	16.878.486.576	656.403.600.508,54	2,57%
2010	19.080.843.100	798.827.285.889,86	2,39%
2011	19.800.675.200	969.348.761.116,15	2,04%
2012	19.750.780.100	1.097.570.898.230,74	1,78%

Berdasarkan Tabel 8 terlihat rasio efisiensi terbesar pada tahun 2009 yaitu 2,57% dan terendah pada tahun 2012 yaitu 1,78%. Dari Tabel 4.3 akan diformulasikan menjadi kriteria kinerja yang bersumber dari Kepmendagri Nomor 690.900.327

tahun 1996 tentang Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan. Kriteria tersebut digunakan untuk melihat tingkat efisiensi kinerja Dispenda Kabupaten Badung yang dijalankan selama tahun 2008-2012.

Tabel 9. Kriteria Kinerja Dispenda Kabupaten Badung ditinjau dari segi efisiensi tahun 2008-2012

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria Efisiensi
2008	2,52%	Sangat Efisien
2009	2,57%	Sangat Efisien
2010	2,39%	Sangat Efisien
2011	2,04%	Sangat Efisien
2012	1,78%	Sangat Efisien

Kriteria efisiensi adalah bagian yang paling penting dalam pengukuran *value for money* karena penggunaan biaya akan terlihat pada rasio ini, dalam rasio ini juga dapat diketahui cara organisasi dalam memanfaatkan anggarannya sesuai dengan program maupun kegiatan yang direncanakan. Beranjak dari Tabel 8 maka akan dipaparkan kriteria kinerja keuangan. Kriteria efisiensi Dispenda Kabupaten Badung melalui pengukuran efisiensi tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 9.

Realisasi program pada Dispenda Kabupaten Badung dari sudut efektivitas akan dinilai dengan membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Tingkat efektivitas dapat

diketahui dengan melakukan perhitungan rasio efektivitas, kemudian tingkat efektivitasnya akan diketahui dengan menggunakan kriteria kinerja keuangan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan, tingkat efektivitas suatu program tidak memperhatikan biaya yang digunakan tetapi ketercapaian tujuan program tersebut. Segala biaya akan digunakan untuk menjalankan program, dan akan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai dari setiap realisasi program. Uraian realisasi penerimaan dan target penerimaan serta rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Anggaran Biaya dan Realisasi Biaya serta Rasio Ekonomis Dispenda Kabupaten Badung tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target Penerimaan (Rp)	Rasio Efektivitas (%)
2008	635.683.630.562,32	549.900.000.000	115,59%
2009	656.403.600.508,54	632.175.000.000	103,83%
2010	798.827.285.889,86	772.750.000.000	103,37%
2011	969.348.761.116,15	864.175.500.000	112,17%
2012	1.097.570.898.230,74	962.900.000.000	113,98%

Tabel 11. Kriteria Kinerja Dispenda Kabupaten Badung ditinjau dari segi efektivitas tahun 2008-2012

Tahun	Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
2008	115,59%	Sangat Efektif
2009	103,83%	Sangat Efektif
2010	103,37%	Sangat Efektif
2011	112,17%	Sangat Efektif
2012	113,98%	Sangat Efektif

Terlihat pada Tabel 10 bahwa semua kegiatan maupun program memiliki rasio efektivitas melebihi 100%. Pada tahun 2008 rasio efektivitas mencapai 115,59%, pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan menjadi 103,83% dan 103,37%, pada tahun 2011 dan 2012 kembali mengalami peningkatan efisiensi menjadi 112,17% dan 113,8%. Hal ini dikarenakan Dispenda Kabupaten Badung meminimalisir keluaran biaya dan dampak dari program yang dijalankan sama baik secara finansial maupun secara fisik program. Berdasar dari Tabel 10 maka dipaparkan kriteria kinerja keuangan yang bersumber dari Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan. Kriteria efektivitas Dispenda Kabupaten Badung Tahun 2009-2011 dapat dilihat pada Tabel 11.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan dapat dilihat realisasi program dari sudut ekonomis *value for money*, menunjukkan program yang dijalankan selama tahun 2008-2012 berada pada kriteria sangat ekonomis tetapi mengalami fluktuatif. Secara teoritis ekonomis menekankan pada penggunaan dana yang serendah-rendahnya guna menghindari

pemborosan atau ada unsur kehematan didalamnya. Kriteria ekonomis yang mendekati 100% atau bahkan lebih dari 100% menunjukkan kinerja yang sangat baik. Program yang sudah dijalankan oleh Dispenda Kabupaten Badung tersebut perlu dipertahankan.

Perhitungan kinerja menggunakan rasio ekonomis ini menunjukkan bahwa konsistensi penganggaran pada Dispenda Kabupaten Badung sangat baik tetapi mengalami fluktuatif. Pada tahun 2008 tingkat rasio ekonomi sebesar 105,56%, pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 108,65%, sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan dari 106,32 menjadi 103,48%, dan pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan sebesar 104,55%.

Pada tahun 2011 memiliki rasio ekonomis terendah sebesar 103,48%. Walaupun memiliki rasio terendah, tetapi kinerja Dispenda Kabupaten Badung masih tergolong sangat ekonomis karena memiliki persentase diatas 100% sesuai dengan penilaian kinerja keuangan berdasarkan rasio ekonomi dari Kepmendagri Nomor 690.900.327 dan pendapat dari Mardiasmo (2002:31) yang menyatakan kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi

biaya yang tidak perlu. Semakin besar persentase ekonomi maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik.

Realisasi program yang diukur dengan rasio efisiensi terlihat bahwa Dispenda Kabupaten Badung melakukan kegiatan operasional organisasi dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Bahkan keseluruhan program di bawah 100%. Dispenda Kabupaten Badung menyelenggarakan program dengan tingkat efisiensi yang tergolong sangat efisien, semua program yang dilaksanakan memiliki rasio di bawah 100%. Program ini sudah menunjukkan program yang bisa menekan biaya serendah-rendahnya dari anggaran, namun mengalami peningkatan pada tahun 2,57% dan tingkat efisiensi paling tinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 1,78%. Program pada tahun 2012 dapat dijadikan pedoman bagi Dispenda Kabupaten Badung untuk bisa memanfaatkan anggaran dalam menjalankan program dengan baik agar tidak terjadi pemborosan.

Kinerja keuangan Dispenda Kabupaten Badung terhadap pajak hotel dan restoran yang memiliki rasio di bawah 100% menunjukkan bahwa kinerja Dispenda sangat efisiensi. Temuan ini sesuai dengan pendapat Munawar (2006) yang menyatakan bahwa proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisiensi apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Semakin kecil efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Efektivitas tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan namun hanya memperhatikan tingkat ketercapaian program sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Mardiasmo (2002)). Dalam menyelenggarakan programnya Dispenda Kabupaten Badung akan menyamakan antara keluaran dan hasil, sehingga besar keluaran dengan semua biaya-biaya akan berakibat sama dengan hasilnya, tidak menutup kemungkinan sebenarnya, untuk setiap program berjalan sangat efektif bahkan sama sekali tidak efektif jika antara keluaran biaya dan hasil berbeda.

Tingkat efektivitas akan berbanding terbalik dengan tingkat efisiensi, karena jika dalam pengukuran efisiensi menghabiskan semua biaya, berakibat pada kinerja yang tidak efisien, namun jika memungkinkan biaya untuk tetap dihabiskan demi mencapai tujuan maka dari segi pengukuran efektivitas semua program akan berjalan efektif.

Terlihat kinerja Dispenda Kabupaten Badung dari sudut efektivitas terhadap pajak hotel dan restoran pada tahun 2008-2012 yang tergolong sangat efektif. Hal ini berarti Dispenda Kabupaten Badung telah menjalankan anggaran sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pengukuran *value for money* dengan rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas pada Dispenda Kabupaten Badung ini mencerminkan aktivitas finansial yang dilakukan. Terlihat bahwa Dispenda Kabupaten Badung dengan bijaksana mengalokasikan dana dalam hal penganggaran dan juga penggunaan dana dari anggaran tersebut. Ekonomis akan menghendaki penganggaran yang tepat, efisiensi menghendaki ada unsur penekanan biaya atau unsur penghematan, dan efektivitas menghendaki untuk setiap program harus mencapai tujuan, sesuai dengan visi dan misi organisasi agar ada peningkatan kinerja dari setiap program yang dijalankan oleh Dispenda Kabupaten Badung.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan bahwa kinerja keuangan Dinas Pedapatan Daerah Kabupaten Badung terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran selama tahun 2008-2012 melalui pengukuran *value for money* sebagai berikut.

Selama tahun 2008-2012 terjadi perkembangan tingkat ekonomis yang perkembangannya bersifat fluktuatif. Hal tersebut dapat dilihat tahun 2008 tingkat ekonomis sebesar 105,65%, kemudian tahun 2009 mengalami peningkatan ekonomis menjadi 108,65%, sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 mengalami penurunan masing-masing menjadi sebesar 106,32% dan 103,48%, dan pada

tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 104,55%.

Dari pengukuran kinerja berdasarkan rasio efisiensi diperoleh rasio efisiensi pada tahun 2008 sebesar 2,52%, tahun 2009 yaitu sebesar 2,57%, 2010 dan 2011 masing-masing memiliki rasio efisiensi sebesar 2,39% dan 2,04%, sedangkan tahun 2012 yaitu 1,78%.

Setiap tahunnya kinerja keuangan Dispenda Kabupaten Badung memiliki rasio efektivitas melebihi 100% yang berarti kinerja keuangan Dispenda Kabupaten Badung tergolong sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan kinerja keuangan Dispenda Kabupaten Badung menggunakan rasio efektivitas pada tahun 2008 mencapai 115,59%, sedangkan pada tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan menjadi 103,83% dan 103,37%, pada tahun 2011 dan 2012 kembali mengalami peningkatan efisiensi menjadi 112,17% dan 113,8%.

SARAN

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran yang dapat dijadikan masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung sebagai berikut. (1) Untuk penilaian kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung disarankan menggunakan pengukuran *value for money*, karena akan memberikan gambaran terhadap pelaksanaan kinerja keuangan di Dispenda Kabupaten Badung serta bertujuan untuk mengukur kinerja *financial* dan *non-financial* secara berimbang dan bertahap, sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian kinerja keuangan Dispenda Kabupaten Badung. (2) Analisis ekonomi, efisiensi dan efektivitas selalu menunjukkan angka yang baik, harapan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik harus selalu dipertimbangkan. (3) Dalam menentukan target penerimaan dan tahun selanjutnya diharapkan semua komponen yang berpotensi dilakukan pemungutan serta biaya-biaya yang sudah dipertimbangkan akan dikeluarkan pada tahun tersebut, agar pada target yang ditetapkan pada tahun selanjutnya menjadi akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2000. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Departemen Dalam Negeri. Keputusan Menti Dalam Negeri. Nomor 690.900.327. 1996. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pegendalian Manajemen, Sistem Pelipatgandaan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Padovani, Emanuele, Yetano, Ana, and Orelli, Rebecca Levy. *Municipal Performance Measurement and Management in Praticce : Which Factors Matter. Paper, EGPA, Malta*.
- Ratung, Tatiana V. dan Priyono Hari Hadi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Symposium Nasional Perpajakan, II.
- Republik Indonesia. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah.
- . Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Werimon, dkk. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Tranparasi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Penegtauhan Dewan Tentang Anggran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional X. Makasar.